

SISTEM SOSIAL DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Nadila Hayati¹, Lewi Ebenezer Hasugian², Siti Jaajah³, Eko Ribawati⁴^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Corresponding author : 2288230011@untirta.ac.id**Abstract**

This research aims to describe the social and economic conditions of the Indonesian people in the post-independence period. This discussion included the state of Indonesia's economy after independence, the Dutch blockade of Indonesia, the efforts made to break through the economic blockade, and the social state of the Indonesian people after independence. After the beginning of independence, Indonesia's economic situation was not good, because it was caused by several factors, namely: Political instability, high inflation, and economic blockade by the Netherlands. The government does not stay silent, they do various ways to overcome economic problems in Indonesia, one of which is by issuing new currencies and providing government loans. The main causes of economic problems in Indonesia are the emptying of the state treasury and tax cuts, and also the Dutch closing the door to Indonesian trade. The purpose of the Dutch blockade was to worsen the social and economic conditions of the Indonesian state and hinder the country's economic growth. The Indonesian government also issued state loans under the guidance of the second minister of finance to overcome this economic problem. In addition, the government also does various ways, such as issuing new currencies, providing government loans, establishing relationships with commercial entities, and developing the financial system. However, Indonesia's economic condition during the period of recession is still very concerning, so more time and various ways are needed to overcome these problems.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia di masa pasca kemerdekaan. Pembahasan ini meliputi keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, blokade Belanda terhadap Indonesia, Usaha-usaha yang dilakukan untuk menembus blokade ekonomi, dan keadaan sosial masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia kurang baik, karena di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, dan blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah tidak tinggal diam, mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah dengan menerbitkan mata uang baru dan memberikan pinjaman pemerintah. Penyebab utama masalah perekonomian di Indonesia adalah pengosongan kas negara dan pengurangan pajak, dan juga belanda menutup pintu perdagangan Indonesia. Tujuan belanda melakukan blokade adalah untuk memperburuk kondisi sosial dan ekonomi negara Indonesia dan menghalangi pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pinjaman negara di bawah bimbingan menteri keuangan II untuk mengatasi persoalan masalah perekonomian ini. Selain itu pemerintah juga melakukan berbagai cara, seperti menerbitkan mata uang baru, pemberian pinjaman pemerintah, menjalin hubungan dengan entitas komersial, dan pengembangan sistem keuangan. Tetapi kondisi ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan itu masih sangat memprihatinkan, sehingga perlu lebih banyak waktu dan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan Indonesia, keadaan perekonomian dan politik negara sangat tidak stabil. Gejolak perekonomian pada awal kemerdekaan disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu : ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, dan blokade ekonomi Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan perekonomian, antara lain dengan menerbitkan mata uang baru dan memberikan pinjaman pemerintah. Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, terjadi hiperinflasi dan kenaikan harga yang sangat pesat. Faktor utama penyebab kesulitan perekonomian pada tahun-tahun awal kemerdekaan adalah pengosongan kas negara dan pengurangan pajak. Belanda juga menutup pintu perdagangan Indonesia sehingga tidak mungkin mengekspor produk pemerintah Indonesia. Alasan Belanda memberlakukan blokade terhadap Indonesia adalah untuk memperburuk keadaan sosial ekonomi negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda, antara lain menjalin hubungan dengan Central Trading Board (BTC) yang diketuai oleh Drs. Soemitro Djodjohadikoesoemo. BTC bertugas memantau kegiatan perdagangan di luar dan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan kegiatan impor dan ekspor. Melalui BTC, Indonesia berhasil menjalin hubungan dagang dengan perusahaan Amerika seperti Isbranden yang mengirimkan kapal Martin Behrman untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pinjaman negara di bawah bimbingan Menteri Keuangan II. Pinjaman negara ini dilaksanakan atas persetujuan BP-KNIP dan dukungan Bank Tabungan Pos yang didirikan pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut.

Ketika Indonesia merdeka belum mempunyai mata uang sendiri sehingga pemerintah mengeluarkan uang kertas yang diberi nama Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai pengganti mata uang Jepang, dimana 1.000 lembar mata uang Jepang bernilai 1 rupiah ORI. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan politik negara. Upaya tersebut meliputi penerbitan mata uang baru, pemberian pinjaman pemerintah, menjalin hubungan dengan entitas komersial, dan pengembangan sistem keuangan. Namun keadaan perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan masih sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang perkembangan sistem sosial dan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan berbagai sumber yang tersedia melalui proses metodologi sejarah yaitu mengumpulkan sumber, verifikasi sumber, intrepertasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah secara kronologis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam dan terperinci. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang eksplorasi atau setting sosial dan juga klarifikasi. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018, hlm. 86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sistem sosial dan ekonomi Indonesia dapat ditemjukan dalam berbagai sumber seperti buku, jurnal, arsip, koran, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia di umumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan ekonomi Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka menjadi pusat perhatian setelah

kemerdekaan. Dampak banyaknya mata uang, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, dan kemudian tidak terkendali. Ketidak-mampuan pemerintah untuk mengontrol mata uang asing telah menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Selain itu, tidak adanya uang tunai, pajak negara, dan bea masuk telah memungkinkan belanja pemerintah meningkat. Petani, yang biasanya memiliki simpanan mata uang Jepang yang paling banyak, telah menjadi korban utama dari inflasi yang sangat menindas ini. Belanda juga telah menghalangi ekspor Indonesia dengan menutup atau memblokir pintu perdagangannya dengan Indonesia. Dengan adanya blokade Belanda, rakyat Indonesia mengalami kesulitan sosial ekonomi yang parah. Akibatnya, masyarakat mulai membenci pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakui tiga mata uang: Mata Uang Bank De Javase, Mata Uang Pendudukan Jepang, dan Mata Uang Bank Indonesia Pemerintah Belanda, mulai tanggal 1 Oktober 1945. Namun, pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak mampu mencapai pembangunan ekonomi yang optimal. Kemerdekaan perlu dipertahankan hingga tahun 1949. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan sentralisasi sektor pembangunan melalui jalur politik. Baru pada tahun 1950, Indonesia mampu mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, keadaan perekonomian (keuangan) Indonesia sangat memprihatinkan. Penyebabnya yaitu:

1. Inflasi yang sangat tinggi disebabkan oleh tidak diaturnya peredaran berbagai mata uang. Pada saat ini, pemerintah Indonesia untuk sementara waktu menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya mata uang Bank Javasse, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
2. Kemudian, pada tanggal 6 Maret 1946, ketika kesulitan ekonomi mempengaruhi penduduk Indonesia, komandan baru AFNEI, Letnan Jenderal Montague Stopford, mengumumkan masuknya dana NICA ke wilayah yang diduduki Sekutu. Koin NICA ini diciptakan sebagai pengganti koin Jepang yang nilainya turun drastis. Pemerintahan Perdana Menteri Shahrir sedang menangani kasus ini. Artinya Sekutu akan mengingkari kesepakatan bahwa tidak akan ada mata uang baru kecuali ada Solusi politik terhadap status Indonesia. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru untuk menggantikan uang kertas Jepang, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia). Berdasarkan teori moneter, banyaknya uang yang beredar berpengaruh terhadap kenaikan harga.
3. Sejak November 1945, terjadi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda untuk memutus perdagangan luar negeri Indonesia.
4. Perbendaharaan kosong.
5. Eksploitasi kolonial secara besar-besaran.

B. Blokade Belanda Terhadap RI

Inflasi di Indonesia terus meningkat dan beberapa faktor menyebabkan hal ini. Beberapa penyebabnya adalah :

1. Peredaran uang Rupiah Jepang yang tidak terkendali.
2. Pemerintah tidak memiliki kendali atas mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama Jepang dan Belanda.
3. Perbendaharaan dan Bea Cukai kosong.
4. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mengakui beberapa mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, termasuk Mata Uang Bank Jawa, mata uang Pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang.

Dampak inflasi terutama dirasakan oleh petani. Sebab, pada masa penjajahan Jepang, petani merupakan produsen yang menyimpan dan memiliki sebagian besar mata uang

Jepang. Blokade tersebut juga akan menutup pintu perdagangan Indonesia dan menghambat ekspor barang-barang Indonesia. Belanda memberlakukan blokade karena :

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah ekspor produk perkebunan Belanda dan asing lainnya.
3. Melindungi WNI dari perbuatan dan perbuatan orang asing.

Harapan Belanda untuk mencapai hal tersebut Lockdown mengakibatkan memburuknya kondisi sosial- kondisi perekonomian, yang mengakibatkan kekurangan impor yang sangat dibutuhkan, inflasi yang tidak terkendali, dan ketakutan serta kerusuhan social yang berujung pada kebencian terhadap pemerintah republik.

C. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Untuk Menembus Blockade Ekonomi

Adapun usaha-usaha yang di lakukan, antara lain:

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surachman pada bulan Juli 1946 dengan persetujuan BP-KNIP.
2. Upaya mendobrak blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500.000 ton. Menjalinkan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan mematahkan blokade Belanda di Sumatera dengan Singapura dan Malaysia sebagai tujuannya.
3. Konferensi ekonomi yang dilaksanakan pada bulan Februari 1946 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan suara bulat untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta kondisi dan pengelolaan perkebunan.
4. Komisi Perencanaan (Komisi Perencanaan Ekonomi) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Komisi perencanaan ini merupakan badan tetap yang bertugas mengembangkan rencana pembangunan ekonomi untuk dua hingga tiga tahun.
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Bersenjata (Rera) 1948 yaitu mantan prajurit dialihkan ke bidang produktif.
6. Kemudian, sebagai Menteri Perbekalan Pangan Umum, I.J. Cassimo membuat rencana produksi lima tahun yang disebut Plan Cassimo, diantaranya :
 - a) Peningkatan kebun benih dan padi kualitas tinggi.
 - b) Pencegahan penyembelihan hewan ternak.
 - c) Reboisasi kawasan belum berkembang.
 - d) Perpindahan penduduk (reinkarnasi).

D. Keadaan Sosial Masyarakat Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab, pada tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, terjadi diskriminasi rasial dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui pembagian kelas dalam masyarakat. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia didominasi oleh bangsa Eropa dan Jepang, sehingga penduduk asli hanya terdiri dari rakyat jelata yang sebagian besar merupakan budak bangsawan dan penguasa. Banyak fasilitas pertanian dan industri di seluruh negeri rusak parah. Dan yang terpenting, jumlah penduduk meningkat sangat signifikan. Setelah meraih kemerdekaannya, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang pelik dalam upaya membangun negara baru. Mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, dengan sekitar 90 persen berada di bawah garis kemiskinan. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas Kesehatan masih sangat minim, terutama di wilayah pedesaan. Terdapat jurang pemisah yang cukup besar antara masyarakat kota yang terpelajar dengan masyarakat desa yang sebagian besar masih buta huruf, menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan.

Pada tahun 1945, hanya sekitar 7,4 persen penduduk Indonesia yang melek huruf, menunjukkan betapa rendahnya Tingkat pendidikan saat itu. Upaya untuk mempersatukan keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang ada di Nusantara menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia menemui hambatan yang tidak mudah. Bahkan, terdapat

ancaman perpecahan dari gerakan separatis seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang menentang pemerintah pusat. Kondisi kesehatan masyarakat juga sangat memprihatinkan, dengan angka kematian bayi yang mencapai 134 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1950 dan sekitar 60 persen anak-anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk. Perempuan Indonesia mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial lainnya akibat budaya patriarki yang masih kuat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks tersebut, masyarakat Indonesia saat itu dipenuhi semangat kebangsaan yang tinggi untuk membangun negara yang merdeka dan sejahtera.

E. Peralihan Perusahaan Asing Menjadi Milik Pemerintah Indonesia

Penciptaan dan pengembangan kelas wirausaha Bumiputera merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kelompok Bumiputera yang memiliki daya saing ekonomi yang kuat dalam perputaran roda perekonomian dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh pengusaha asing. Meskipun kedaulatan politik Indonesia sebagai negara merdeka telah diakui oleh KMB pada tahun 1949, Sektor perekonomian Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang perusahaan milik Belanda. Isi KMB 1949 dengan jelas menyoroti besarnya keuntungan yang diperoleh investor swasta Belanda, dan menunjukkan bahwa keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu masih memberikan kondisi yang menguntungkan bagi terciptanya perekonomian. Hal ini harus diterima, mengingat hal tersebut tidak. Hal ini memberikan iklim yang dapat mengubah aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. KMB memberikan beban ekonomi sebesar \$4,444 pada perekonomian Indonesia. Prestasi KMB di bidang perekonomian tertuang dalam Perjanjian Keuangan dan Ekonomi yang dijelaskan oleh Boediono (2016: 67) sebagai berikut:

1. Perang KMB, termasuk kebebasan transfer keuntungan.
2. Indonesia mengeluarkan biaya sebesar US\$1,13 miliar untuk pencairan dana pemerintah ke Hindia Belanda (dalam dan luar negeri).
3. Untuk kebijakan tertentu (misalnya nasionalisasi), Indonesia perlu berkonsultasi atau mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda.

Indonesia menanggung biaya 17.000 mantan pekerja Belanda yang tinggal di Indonesia selama dua tahun dan menampung 26.000 mantan tentara KNIL. Sumber utama investasi asing di Indonesia sebagian besar berasal dari Belanda. Tujuan pemerintah Belanda pada tahun itu adalah melakukan investasi untuk kebutuhan produk dalam negeri dan memperkuat sektor perekonomian daerah jajahan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar modal swasta berasal dari sektor perkebunan sekitar 80 persen. Dalam hal ini, tidak hanya Belanda yang akan berperan, tapi juga Inggris Raya dan Amerika Serikat. Misalnya, pada tahun 1922, Inggris menginvestasikan 245 juta gulden (77,5%) di sektor perkebunan, sementara 55 juta gulden, atau sekitar 22,5% dari total nilai investasi perkebunan, diinvestasikan di industri. Pada saat yang sama, Amerika juga ikut serta dalam kegiatan investasi di sektor penanaman dengan jumlah 28 juta gulden atau sekitar 70%, dan di industri manufaktur dengan jumlah 7 juta gulden dengan porsi 29% (Kanumoyoso, 2001).

Pemerintah kolonial kemudian menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, menerapkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan sejak pertengahan tahun 1930-an. Pada saat itu, diterbitkan peraturan yang membatasi produksi dan impor barang dari Jepang. Pada tahun 1937, Kementerian Perekonomian mulai merumuskan strategi pembangunan jangka panjang, dan oleh karena itu, pemerintah menyiapkan rencana industri pada tahun 1941, yang tujuannya adalah untuk memungkinkan sebagian besar badan usaha milik negara membangun pabrik dalam skala besar. . . untuk produksi bahan baku yang dibutuhkan industri dunia (Chalmers, 1996; Mahardika dan Ramadhan, 2021). Jika pada awal abad ke-19 pertumbuhan industri didukung oleh produk pertanian seperti tembakau, karet, kopi, teh, gula, dan minyak sawit, pada awal abad ke-20 inisiatif

pembangunan ekonomi. diambil alih oleh beberapa perusahaan komersial. Merekalah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya industri modern. Namun sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan milik Belanda. Bentuk perusahaannya cukup beragam, mulai dari anak perusahaan asing hingga perusahaan lokal yang menjadi agen tunggal dan bertugas mewakili perusahaan asing (Booth,1998). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan dibandingkan dengan masa kolonial di Hindia Belanda, yang mungkin berarti bahwa perusahaan-perusahaan Belanda masih menguasai sektor-sektor ekonomi besar, sedangkan para pengusaha asli hanya menguasai industri-industri kecil

Hingga tahun 1957-1958, 80% hasil perkebunan Indonesia dikirim ke Eropa, termasuk perwakilan pedagang Belanda di kota Amsterdam, karena perkebunan besar di Indonesia yang sebelumnya dikelola Belanda mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Belanda yang bertanggung jawab terhadap diseminasi hasil produksi (Kanumoyoso,2001). Berdasarkan penjelasan berbagai permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh aktivitas ekonomi luar negeri. Pemerintah Indonesia yang berupaya menerapkan sistem perekonomian nasional yang mandiri akan menghadapi kendala selama modal asing tetap beroperasi dan mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu solusi yang saat itu dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan asing yang masih beroperasi.

Peristiwa ini dapat dilihat dari sudut pandang materialisme sejarah ala Karl Marx. Karl Marx mengajukan serangkaian rumusan untuk memahami kondisi sosial masyarakat yang diperbudak sistem kapitalis akibat praktik kolonialisme. Masyarakat kecil yang dipekerjakan oleh para kapitalis kemungkinan besar tidak akan memperoleh keuntungan sebesar majikan mereka. Tenaga kerja terkuras habis, yang miskin semakin miskin, kekayaan yang kaya bertambah. Seperti yang disebut oleh Sukarno sebagai "penindasan terhadap bangsa lain".

KESIMPULAN

Setelah Indonesia merdeka, keadaan ekonominya sangat buruk karena inflasi tinggi, blokade ekonomi Belanda, kekosongan perbendaharaan, dan eksploitasi kolonial yang besar. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ekonomi, termasuk membentuk Planning Board untuk merancang rencana pembangunan jangka panjang. Blokade Belanda terhadap Indonesia setelah kemerdekaan menyebabkan inflasi meningkat, yang berdampak pada petani dan perdagangan negara. Tujuan blokade Belanda tidak hanya keamanan, tetapi juga untuk memburukkan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia agar masyarakat tidak puas dengan pemerintah republik. Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi dengan diplomasi ke India dan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri, termasuk perusahaan swasta AS. Tindakan ini membantu mengatasi blokade dan membuka jalur perdagangan baru untuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Ribawati, M.pd, dkk. 2023. "Sejarah Sosial Ekonomi Kajian Masyarakat Jawa dan Banten". Banten : *Media Edukasi Indonesia*.
- Kartodirdjo, S. 1987. "Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900". Yogyakarta : *Gadjah Mada University Press*.
- Mahardika, Mochamad Dimas Galuh. 2022. "Titik Balik Ekonomi Indonesia Paca Kemerdekaan: Perspektif Materialisme Historis". Surakarta : *Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 2 No 2*.

Sindoro

CENDIKIA PENDIDIKAN

ISSN: 3025-6488

Vol.5 No 3 Tahun 2024

1-10

Prefix DOI : doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317